



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 134).
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Bakesbangpol yang selanjutnya disingkat Renstra Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 3 (tiga) tahun;
6. Rencana Kerja Bakesbangpol yang selanjutnya disingkat Renja Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Bakesbangpol untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Bakesbangpol yang selanjutnya disingkat RKA Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Bakesbangpol serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Pasal 2

Renja Bakesbangpol Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Bakesbangpol untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 3

Renja Bakesbangpol Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Bakesbangpol tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Bakesbangpol tahun lalu.

## Pasal 4

- (1) Renja Bakesbangpol Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Bakesbangpol Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak tercantum dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Renja Bakesbangpol Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Bakesbangpol dalam menyusun RKA Bakesbangpol.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 148

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 148 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

**RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sehingga diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Beberapa hal yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah berupa Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan Perangkat Daerah, pendanaannya serta prakiraan pagu anggaran. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah. Selain itu dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

**1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan ini, adalah:

1. Sebagai pedoman dalam koordinasi lintas pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber pendanaan;

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan ini, adalah:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
2. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan, dan akuntabel serta konsisten dengan dengan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bakesbangpol dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang penyusunan, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022**

Bab ini menguraikan mengenai Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2024.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN**

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 serta pendanaannya.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tentang Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan serta Rencana Tindak Lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.**

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran pada Tahun 2022 tidak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 sebesar Rp 25.267.968.284,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.942.342.649,00 (94,75%) dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin. Adapun realisasi untuk setiap program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.782.039.138,00 terealisasi sebesar Rp 6.177.631.357,00 (91,09%) dengan capaian kinerja sebesar 97,07%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

**a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 44.765.000,00 terealisasi sebesar Rp 38.292.728,00 (85,54%) dengan capaian kinerja sebesar 90,00% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 12.065.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.907.500,00 (73,83%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 32.700.000,00 terealisasi sebesar Rp 29.385.228,00 (89,86%) dengan capaian kinerja sebesar 80,00% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 sebesar 100%.

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 4.389.798.118,00 terealisasi sebesar Rp 3.967.353.038,00 (90,38%) dengan capaian kinerja sebesar 97,27% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar

Rp 3.906.598.118,00 terealisasi sebesar Rp 3.510.517.294,00 (89,86%) dengan capaian kinerja sebesar 91,83% dari target sebesar 100%.

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 399.060.000,00 terealisasi sebesar Rp 385.045.744,00 (96,49%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 84.140.000,00 terealisasi sebesar Rp 71.790.000,00 (85,32%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 106.218.660,00 terealisasi sebesar Rp 103.003.682,00 (96,97%) dengan capaian kinerja sebesar 94,00% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 35.267.700,00 terealisasi sebesar Rp 34.990.682,00 (99,21%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp 70.950.960,00 terealisasi sebesar Rp 68.013.000,00 (95,86%) dengan capaian kinerja sebesar 88,00%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 487.625.360,00 terealisasi sebesar Rp 479.192.091,00 (98,27%) dengan capaian kinerja sebesar 98,21% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 16.686.000,00 terealisasi sebesar Rp 16.487.800,00 (98,81%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp 45.050.260,00 terealisasi sebesar Rp 44.848.500,00 (99,55%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 109.325.600,00 terealisasi sebesar Rp 108.430.800,00 (99,18%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 41.712.500,00 terealisasi sebesar Rp 41.196.800,00 (98,76%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp 6.650.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.685.000,00 (85,49%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 58.950.000,00 terealisasi sebesar Rp 53.850.000,00 (91,35%) dengan capaian kinerja sebesar 87,50% dari target sebesar 100%.
  - 7) Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 209.251.000,00 terealisasi sebesar Rp 208.693.191,00 (99,73%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana Rp 1.275.891.840,00 terealisasi sebesar Rp 1.127.193.561,00 (88,35%) dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp 760.505.900,00 terealisasi sebesar Rp 629.300.000,00 (82,75%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - 2) Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 133.216.500,00 terealisasi sebesar Rp 133.182.500,00 (99,97%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 382.169.440,00 terealisasi sebesar Rp 364.711.061,00 (95,43%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 134.069.500,00 terealisasi sebesar Rp 125.087.747,00 (93,30%) dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 134.069.500,00 terealisasi sebesar Rp 125.087.747,00 (93,30%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana Rp 343.670.660,00 terealisasi sebesar Rp 337.508.510,00 (98,21%) dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 301.726.600,00 terealisasi sebesar Rp 298.935.750,00 (99,08%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 23.944.060,00 terealisasi sebesar Rp 23.572.760,00 (98,45%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 15.000.000,00 (83,33%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

## **2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tahun 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp 3.147.604.406,00 terealisasi sebesar Rp 2.900.917.952,00 (92,16%) dengan capaian kinerja sebesar 96,47%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

### **a. Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi dana Rp 3.147.604.406,00 terealisasi sebesar Rp 2.900.917.952,00 (92,16%) dengan capaian kinerja sebesar 88,10% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 3.147.604.406,00 terealisasi sebesar Rp 2.900.917.952,00 (92,16%) dengan capaian kinerja sebesar 87,80% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 sebesar 100%.

## **3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik tahun 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp 5.477.521.200,00 terealisasi sebesar Rp 5.430.939.000,00 (99,15%) dengan capaian kinerja sebesar 96,57%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

### **a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,



Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi dana sebesar Rp 5.477.521.200,00 terealisasi sebesar Rp 5.430.939.000,00 (99,15%) dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp 5.477.521.200,00 terealisasi sebesar Rp 5.430.939.000,00 (99,15%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### **4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2022 mendapat alokasi dana Rp 2.512.584.700,00 terealisasi sebesar Rp 2.314.821.500,00 (92,13%) dengan capaian kinerja sebesar 90,00%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp 2.512.584.700,00 terealisasi sebesar Rp 2.314.821.500,00 (92,13%) dengan capaian kinerja sebesar 92,31% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.345.208.700,00 terealisasi sebesar Rp 2.173.317.500,00 (92,67%) dengan capaian kinerja sebesar 92,31% dari target sebesar 100%.
- 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Meiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 167.376.000,00 terealisasi sebesar Rp 141.504.000,00 (84,54%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### **5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp 976.666.940,00 terealisasi sebesar Rp 967.715.240,00 (99,08%) dengan capaian kinerja sebesar 89,00%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi dana sebesar Rp 976.666.940,00 terealisasi sebesar Rp 967.715.240,00 (99,08%) dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 976.666.940,00 terealisasi sebesar Rp 967.715.240,00 (99,08%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### **6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik**

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik tahun 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.371.551.900,00 terealisasi sebesar Rp 6.150.317.600,00 (96,53%) dengan capaian kinerja sebesar 92,60%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi dana Rp 6.371.551.900,00 terealisasi sebesar Rp 6.150.317.600,00 (96,53%) dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.238.781.900,00 terealisasi sebesar Rp 6.024.465.100,00 (96,56%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 132.770.000,00 terealisasi sebesar Rp 125.852.500,00 (94,79%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dari hasil capaian kinerja dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kinerja program/kegiatan pada tahun 2022 secara keseluruhan semua indikator kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tahun 2022, yaitu :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Adanya kerjasama yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan keagamaan, suku, etnis dan golongan lainnya;
4. Adanya kerjasama dengan BNN Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan narkoba.

Dampak yang ditimbulkan dari Capaian Kinerja Program dan Kegiatan diantaranya :

1. Meningkatnya pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya rasa solidaritas dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
3. Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap kejadian konflik di masyarakat;
4. Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kerjasama dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;
3. Meningkatkan kualitas fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas materi sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dapat kita lihat pada Tabel 2.1 (T-C.29) dan Tabel 2.1.A

Tabel 2.1 (T-C.29)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan  
Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)  
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>TAHUN 2019 - 2020</b>										
<b>1 05 01</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	168 rek/bln	168 rek/bln	-	-	-	-	168 rek/bln	100%
1 05 01 07	Penyediaan Jasa Administrai Keuangan	Jumlah pembayaran honor Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan	360 org/bln	360 org/bln	-	-	-	-	360 org/bln	100%
1 05 01 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	98 jenis/kali	98 jenis/kali	-	-	-	-	98 jenis/kali	100%
1 05 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	5.530 eks	5.530 eks	-	-	-	-	5.530 eks	100%
1 05 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	166 unit	166 unit	-	-	-	-	166 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	596 unit	596 unit	-	-	-	-	596 unit	100%
1 05 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	17 kali	17 kali	-	-	-	-	17 kali	100%
1 05 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	80 org/kali	80 org/kali	-	-	-	-	80 org/kali	100%
1 05 01 19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	378 org/bln	378 org/bln	-	-	-	-	378 org/bln	100%
1 05 01 23	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja triwulan dan tahunan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100%
<b>1 05 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 02 11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	20 unit	20 unit	-	-	-	-	20 unit	100%
1 05 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	100%
1 05 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	30 unit	30 unit	-	-	-	-	30 unit	100%
1 05 02 29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler	Jumlah pemeliharaan mebeler	10 unit/kali	10 unit/kali	-	-	-	-	10 unit/kali	100%
1 05 02 30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	65 unit/kali	65 unit/kali	-	-	-	-	65 unit/kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1 05 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang selesai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja tribulan dan tahunan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100%
<b>1 05 15</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase jumlah peserta yang memahami sistem deteksi dan cegah dini terhadap konflik masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pemantauan keamanan wilayah	6 keg	6 keg	-	-	-	-	6 keg	100%
1 05 15 08	Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	300 org	300 org	-	-	-	-	300 org	100%
<b>1 05 35</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase daerah rawan konflik yang terbina</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 35 01	Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	319 org	319 org	-	-	-	-	319 org	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 35 02	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
<b>1 05 17</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase jumlah kelompok masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 17 03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	20 kali	20 kali	-	-	-	-	20 kali	100%
1 05 17 05	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
<b>1 05 36</b>	<b>Program Kesatuan Bangsa</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 36 01	Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan di Kab. Pasuruan	902 org	902 org	-	-	-	-	902 org	100%
1 05 36 02	Peningkatan Toleransi dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan toleransi dan pemantapan pembauran kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	400 org	400 org	-	-	-	-	400 org	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1 05 20</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Persentase jumlah peserta sosialisasi yang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 20 01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	1.800 org	1.800 org	-	-	-	-	1.800 org	100%
<b>1 05 21</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase jumlah peserta sosialisasi yang memahami etika dan kultur politik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 21 12	Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik Masyarakat Yang Relevan Bagi Perlindungan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi desiminasi hak sipil politik masyarakat yang relevan bagi perlindungan HAM	200 org	200 org	-	-	-	-	200 org	100%
1 05 21 13	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Kultur Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran pemahaman etika dan kultur politik	2.000 org	2.000 org	-	-	-	-	2.000 org	100%
1 05 21 14	Desk Pemilihan Presiden dan Legeslatif Tahun 2019	Jumlah petugas pemantau pelaksanaan Desk Pemilihan Presiden dan Legeslatif Tahun 2019	1.232 org	1.232 org	-	-	-	-	1.232 org	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1 05 37</b>	<b>Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat dan partai politik yang terfasilitasi pengembangan etika dan budaya politik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 37 01	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Kultur Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran pemahaman etika dan budaya politik	200 org	200 org	-	-	-	-	200 org	100%
<b>1 05 25</b>	<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat yang memahami hukum dan HAM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 25 01	Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama yang Menjamin Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM	400 org	400 org	-	-	-	-	400 org	100%
1 05 25 03	Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
<b>1 05 27</b>	<b>Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</b>	<b>Persentase Ormas, LSM dan Partai Politik yang aktif</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>200%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 27 01	Fasilitasi Pemberdayaan Ormas dan LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi pemberdayaan Ormas dan LSM	450 org	450 org	-	-	-	-	450 org	100%
1 05 27 02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi	200 org	200 org	-	-	-	-	200 org	100%
1 05 27 03	Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah perwakilan partai politik yang mengikuti verifikasi bantuan keuangan partai politik	108 org	108 org	-	-	-	-	108 org	100%
1 05 27 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah ormas/LSM yang dimonitor di Kabupaten Pasuruan	80 lemb	80 lemb	-	-	-	-	80 lemb	100%
1 05 27 06	Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemberdayaan ormas/lsm	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
<b>1 05 33</b>	<b>Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Persentase peserta sosialisasi yang memahami toleransi antar umat beragama dan antar etnis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 33 01	Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama	600 org	600 org	-	-	-	-	600 org	100%
1 05 33 02	Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	175 org	175 org	-	-	-	-	175 org	100%
<b>TAHUN 2021 - 2023</b>										
<b>8 01 01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97,07%</b>	<b>97,07%</b>	<b>100%</b>	<b>99,02%</b>	<b>99,02%</b>
8 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	100%	100%	90%	90%	100%	96,67%	96,67%
8 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	1 dok	3 dok	100,00%
8 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja yang disusun	30 lap	-	15 lap	12 lap	80%	14 lap	26 lap	86,66%
8 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	100%	100%	94,64%	94,64%	100%	98,21%	98,21%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.176 org/bln	364 org/bln	28 org/bln	25 org/bln	89,28%	28 org/bln	1,120 org/bln	95.23%
8 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	192 org/bln	192 org/bln	-	0%	0%	-	192 org/bln	100.00%
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	24 dokumen	-	12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	100.00%
8 01 01 2 02 03	Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan	192 org/bln	192 org/bln	-	0%	0%	-	192 org/bln	100.00%
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 dokumen	-	12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	100.00%
8 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	75,00%	100%	94%	94%	100%	89,67%	89,67%
8 01 01 2 05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 Paket	-	2 paket	2 paket	100%	1 Paket	3 paket	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 01 2 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	-	-	-	-	50 orang	45 orang	90,00%
8 01 01 2 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	8.500 orang	5.400 orang	-	-	-	-	5,400 org	63,52%
8 01 01 2 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang	-	50 orang	44 orang	88%	-	44 orang	88,00%
8 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD	100%	100%	100%	98,21%	98,21%	100%	99,40%	99,40%
8 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis/kali	4 jenis/kali	-	0%	0%	-	4 jenis/kali	80,00%
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100,00%
8 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	24 jenis/kali	24 jenis/kali	-	0%	0%	-	24 jenis/kali	100,00%
		Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang	5 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	28 jenis/kali	28 jenis/kali	-	0%	0%	-	28 jenis/kali	100.00%
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	100.00%
8 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	10 jenis/kali	10 jenis/kali	-	0%	0%	-	10 jenis/kali	100.00%
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	100.00%
8 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	-	12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	100.00%
8 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	255 orang	255 orang	-	0%	0%	-	255 orang	100.00%
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	16 Laporan	-	8 laporan	7 laporan	87,50%	8 laporan	15 laporan	93,75%
8 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	27 org/kali	27 org/kali	-	0%	0%	-	27 org/kali	100.00%
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	24 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
8 01 01 2 07.02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 unit	-	7 unit	7 unit	100%	-	7 unit	70,00%
8 01 01 2 07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80,00%
8 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 unit	4 unit	72 unit	72 unit	100%	14 unit	90 unit	225,00%
8 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
8 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, internet, air dan listrik	84 rek/bln	84 rek/bln	-	0%	0%	-	84 rek/bln	100,00%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100,00%
8 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 unit	15 unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	51 unit	100,00%
8 01 01 2 09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	178 unit	4 unit	64 unit	64 unit	100%	17 unit	85 unit	47,75%
8 01 01 2 09 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	1 unit	50,00%
<b>8 01 02</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat yang memahami ideologi Pancasila</b>	<b>90%</b>	<b>80,00%</b>	<b>85%</b>	<b>82%</b>	<b>96,47%</b>	<b>90%</b>	<b>84,00%</b>	<b>93,33%</b>
8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	100%	87,80%	87,80%	100%	95,93%	95,93%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 02 2 01 03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3,820 orang	150 org	4.100 orang	3.600 orang	87,80%	9.260 org	13.010 orang	340,57%
<b>8 01 03</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah</b>	<b>28,00%</b>	<b>25,98%</b>	<b>25,98%</b>	<b>25,60%</b>	<b>98,54%</b>	<b>28,00%</b>	<b>26,53%</b>	<b>94,74%</b>
8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi dan pemantauan situasi politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 03 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilu Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Kab. Pasuruan	6.854 org	250 orang	2.750 orang	2.750 orang	100%	4.380 orang	7.380 orang	107,67%
		2 Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	48 parpol	27 parpol	9 parpol	9 parpol	100%	9 parpol	45 parpol	93,75%
		3 Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	2 lembaga	-	-	0%	0%	2 lembaga	2 lembaga	100,00%
<b>8 01 04</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90,48%</b>	<b>90,48%</b>	<b>100%</b>	<b>96,83%</b>	<b>96,83%</b>
8 01 04 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	100,00%	100%	100%	94,87%	94,87%	100%	98,29%	98,29%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 04 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	3,340 org	80 orang	2.450 orang	2.450 orang	100%	2.020 orang	4.550 orang	136,22%
		2 Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	47 lemb	22 lemb	13 lemb	11 lemb	84,62%	12 lemb	45 lemb	95,74%
8 01 04 2 01 04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	116 lemb 8 Laporan	116 lemb	- 4 Laporan	- 4 Laporan	- 100%	- 2 Laporan	116 lemb 8 Laporan	100,00% 100,00%
8 01 05	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Kelompok masyarakat yang terfasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Pasuruan	3.000 orang	-	2.450 orang	2.450 orang	100%	5.200 orang	7.650 orang	<b>255,00%</b>
<b>8 01 06</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50,09%</b>	<b>50,09%</b>	<b>100%</b>	<b>83,36%</b>	<b>83,36%</b>
8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun N-2 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun N-1 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 06 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Kabupaten Pasuruan	2.100 orang	200 orang	1.250 orang	1.250 orang	100%	5.030 orang	6.480 org	308,57%
		2 Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	13 lemb	4 lemb	4 lemb	4 lemb	100%	5 lemb	13 lemb	100,00%
8 01 06 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	10 Laporan	100,00%
8 01 06 2 01 05	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	-	-	0%	0%	6 dok	1 Laporan	100,00%

Tabel 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	93,33%	Capaian kinerja program kurang dari target yang telah ditentukan karena dari test dan proper test ada beberapa peserta yang masih belum memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Agar menerapkan kerangka acuan kerja dan mengubah metode sosialisasi yang dapat dipahami masyarakat sehingga capaian program dan kegiatan bisa maksimal
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95,93%	Capaian kinerja kegiatan kurang dari target yang telah ditentukan hal ini disebabkan penambahan volume kegiatan pada saat APBD Perubahan dengan waktu yang terbatas	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	340,57%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pemangku kepentingan	
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	94,74%	Capaian kinerja program kurang dari target padahal peran Partai politik dan lembaga demokrasi sudah melakukan pendidikan politik namun pemahaman masyarakat belum meningkatkan	Melakukan pendidikan politik yang mudah dipahami masyarakat serta partai politik dan Anggota dewan melalui dana hibah agar melakukan pendidikan politik lebih menyeluruh dan bukan hanya untuk konstituen nya saja
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	100%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan hal ini disebabkan semua pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik berdasarkan capaian sub. Kegiatan 100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100,47%	Capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Panitia Kegiatan bersama Partai Politik, KPU dan Bawaslu serta pelaksana kegiatan	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	96,83%	Capaian program kurang dari target yang ditetapkan karena berkurangnya Ormas yang berperan aktif dalam pemberdayaan organisasi	Melakukan pendekatan dan koordinasi secara aktif dengan pimpinan lembaga organisasi masyarakat
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	98,29%	Capaian Kegiatan kurang dari target yang ditetapkan karena ada 2 Lembaga Ormas yang tidak mencairkan bantuan hibahnya karena ada perbedaan kepentingan didalam organisasinya	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	115,98%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pelaksana kegiatan	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	Tersusunnya jadwal monitoring yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya dan didukung dengan SDM yang cukup dalam mengevaluasi dan membuat laporan	
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	100%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan karena adanya monitoring dan evaluasi dari Pimpinan	Agar melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BNN Kabupaten Pasuruan dalam menentukan sasaran kegiatan serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan hal ini disebabkan semua pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik berdasarkan capaian sub. Kegiatan 100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	255%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pelaksana kegiatan	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	83,36%	kurangnya komunikasi dengan Tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga penurunan konflik sosial politik belum tercapai dari target yang ditetapkan	Melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat dan agama serta secara intensif melakukan monitoring wilayah agar setiap kejadian dapat terdeteksi dan dapat diselesaikan dengan baik.
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan hal ini disebabkan semua pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik berdasarkan capaian sub. Kegiatan 100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	204,29%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pelaksana kegiatan	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	Tersusunnya jadwal monitoring yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya dan didukung dengan SDM yang cukup dalam mengevaluasi dan membuat laporan	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Adanya Peran Pimpinan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan FORKOPIMDA	



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati mempunyai tugas menyelenggaraan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018 - 2023, yaitu :

- a. Tujuan yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah :

**" Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial Politik "**

- b. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah :

**" Meningkatkan Situasi dan Kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan "**.

Evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilihat dari capaian indikator sasaran strategis tahun 2022 yaitu :

1. Persentase potensi konflik yang dapat dicegah

Penentuan Indikator ini didasarkan pada adanya Isu-isu yang berkembang di masyarakat yang mengakibatkan suatu tindakan yang mengarah pada terjadinya konflik di masyarakat.

Indikator ini membandingkan antara Potensi Konflik yang dapat dicegah terhadap potensi konflik yang akan terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat diselesaikan semuanya atau tercapai 100 %.

Adapun Formula perhitungan Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Potensi Konflik yang dapat dicegah}}{\text{Potensi Konflik yang akan terjadi}} \times 100 \%$$

2. Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat

Penentuan Indikator ini didasarkan pada adanya Kejadian Konflik di masyarakat yang harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan beberapa unsur masyarakat, lembaga, Instansi Pemerintah dan Pimpinan Daerah.

Indikator ini membandingkan antara Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan konflik yang terjadi dan diharapkan dapat diselesaikan semuanya atau tercapai 100 %.

Adapun Formula perhitungan Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}} \times 100 \%$$

Beberapa potensi yang bisa ditingkatkan dengan adanya program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, diantaranya yaitu :

- a. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama, suku, etnis dan golongan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang mendorong terciptanya suasana yang kondusif dalam menjalankan perekonomian di daerah;
- c. Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat dengan kewaspadaan, deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat yang akan terjadi;
- d. Kuatnya semangat kebangsaan tidak akan luntur/terpengaruh dengan adanya perkembangan berbagai teknologi informasi;
- e. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi, meningkatnya kesadaran hak berpolitik, semakin tumbuhnya budaya politik yang kuat dan stabilitas politik yang makin baik.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.2( T-C.30 )

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>IKU (Tujuan &amp; Sasaran) P-Renstra 2018-2023</b>												
I	Tujuan											
	Persentase konflik sosial politik yang tertangani			100%	100%			90,90%	-			Capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan hal ini karena dari 22 kasus/konflik yang terjadi hanya 20 kasus yang bisa tertangani sedangkan 2 kasus belum tertangani dengan baik
II	Sasaran											
1.	Persentase Potensi Konflik yang dapat dicegah			100%	100%			100%	-			Capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena dari 5 kasus yang akan terjadi semuanya dapat dicegah sehingga tidak sampai terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2.	Persentase Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat			100%	100%			88,24%	-			Capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan karena dari 17 kasus/konflik yang terjadi hanya 15 kasus yang dapat diselesaikan secara musyawarah sedangkan 2 kasus belum dapat tertangani dengan baik hal ini dikarenakan ada 3 kelompok yang saling mempertahankan kepentingan masing-masing untuk mempertahankan perebutan pengolahan limbah produktif.

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			78	80			80,10	-			
<b>IKU (Tujuan &amp; Sasaran) Renstra 2024-2026</b>												
I	Tujuan											
	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud					18%	20%		-	18%	20%	
II	Sasaran											
1.	Persentase Kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti					94%	96%	90,90%	-	94%	96%	
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			78	80	80.25	81	80,10	-	80.25	81	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan**

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang ada serta permasalahan dan hambatan yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor internal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai berikut :
  - a. belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keormasan / Organisasi sebagai sumber dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan,
  - b. adanya hubungan/koordinasi antara satuan kerja yang cukup baik dan telah berkembangnya budaya kerja (motivasi kerja yang tinggi).
  - c. Disisi lain kelemahan yang ada adalah adanya keterbatasan jumlah pegawai, terbatasnya sarana pendukung kerja yang memadai serta terbatasnya
2. Faktor eksternal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai berikut :
  - a. Kurangnya pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya generasi muda;
  - b. Masih adanya potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok;
  - c. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan Hak Pilihnya baik pada Pemilu maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah ;
  - d. Permasalahan Limbah Perusahaan antara lain : Pencemaran aliran sungai akibat limbah perusahaan maupun perebutan pengolahan limbah yang bernilai ekonomis.
  - e. Konflik buruh dengan perusahaan terkait Upah kerja maupun UU Omnibus law Cipta kerja;
  - f. Permasalahan Konflik Tanah antara TNI dengan warga sekitar.
  - g. Meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan anak muda.
3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan :
  - a. Tantangan :
    - 1) Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah cukup luas yang merupakan daerah industri dengan banyak perusahaan dan jumlah buruh yang sangat besar sehingga rentan terjadi konflik;
    - 2) Sebagian Penduduk Kabupaten Pasuruan adalah Pemilih Pemula yang belum memiliki bekal pengetahuan politik sedangkan mereka telah memiliki hak pilih.
    - 3) Kabupaten Pasuruan yang mayoritas penduduknya beragama Islam apabila tidak dijaga kerukunan antar umat beragama rentan terjadi konflik sosial berbasis agama ;
    - 4) Sebagian besar penduduk Kabupaten Pasuruan dengan tingkat pendidikan SMA kebawah menyebabkan kurangnya pengertian terhadap pemahaman dan pengamalan Pancasila, bhineka tunggal ika dan NKRI;

5) Semakin luasnya peredaran narkoba di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

b. Peluang :

- 1) Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Adanya Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan Organisasi Masyarakat untuk mendorong meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Pasuruan ;
- 3) Terbentuknya Forum Koordinasi Umat Beragam (FKUB) sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan keagamaan;
- 4) Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai Lembaga yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan suku, etnis dan golongan lainnya;
- 5) Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dalam rangka pencegahan dan deteksi dini terhadap tiap kejadian ( konflik ) di masyarakat;
- 6) Adanya kerja sama pemerintah dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan peredaran/penggunaan narkoba khususnya pada anak muda dan anak sekolah.

Berdasarkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, adalah :

1. Masih adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan dapat menjurus pada aksi-aksi anarkhisme;
2. Ancaman Ideologi Pancasila dan Keutuhan NKRI dengan semakin berkembangnya media social menyebabkan pergeseran nilai-nilai social di masyarakat. Hoax dan SARA menjadi tantangan bagi Bakesbangpol yang mengemban tugas dan fungsi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;
3. Tingkat partisipasi politik masyarakat yang masih rendah ;
4. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden, DPR-RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota dan DPD serta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak 2024 akan membawa dampak pada maraknya kegiatan di bidang politik yang rentan akan terjadinya Instabilitas politik di daerah.
5. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya gesekan yang menimbulkan konflik SARA.
6. Terjadinya Konflik Antar Perguruan, Remaja, Ormas , Agama dan Aliran Kepercayaan.

7. Meningkatnya Peredaran Narkoba serta Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Dari berbagai Isu strategis yang berkembang ada beberapa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub. Kegiatan prioritas pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang dapat menghasilkan kaderisasi handal yang dapat mendukung pembangunan daerah;
2. Meningkatkan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Pemilih Pemula dalam rangka mendukung suksesnya Pemilu/Pemilukada 2024 ;
3. Sosialisasi Kerawanan Konflik menjelang Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada 2024 ;
4. Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
5. Meningkatkan Sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan Narkotika untuk mengurangi tindak kriminalitas dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pasuruan ;
6. Penguatan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama yang merupakan pilar utama dalam menciptakan kondusifitas daerah.

#### **2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan yang tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak semuanya dapat dimasukkan dalam Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Hal ini karena dalam Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Menyesuaikan dengan Isu-isu strategis yang sedang berkembang ;
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilukada Tahun 2024.
3. Kondisi dan Kebutuhan Tahun 2024 baik jenis kegiatan maupun perencanaan Pagu Anggaran;

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.3 ( T-C.31 ).

**Tabel 2.3 (T-C.31)**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang sesuai regulasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.571.681.040</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang sesuai regulasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.571.681.040</b>	<b>Sumber Dana DAU</b>
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kabupaten Pasuruan</i>	<i>Persentase konsistensi indikator program/kegiatan/sub. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 47.968.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kabupaten Pasuruan</i>	<i>Persentase konsistensi indikator program/kegiatan/sub. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 47.968.000</i>	<i>Sumber Dana DAU</i>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 dok	Rp 14.218.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 dok	Rp 14.218.000	Sumber Dana DAU
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 lap	Rp 33.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 lap	Rp 33.750.000	Sumber Dana DAU
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kabupaten Pasuruan</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 4.195.158.040</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kabupaten Pasuruan</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 4.195.158.040</i>	<i>Sumber Dana DAU</i>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 org/bln	Rp 3.685.550.296	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 org/bln	Rp 3.685.550.296	Sumber Dana DAU
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Rp 396.447.744	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Rp 396.447.744	Sumber Dana DAU



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 113.160.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 113.160.000	Sumber Dana DAU
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp 92.397.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp 92.397.000	Sumber Dana DAU
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 orang	Rp 92.397.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 orang	Rp 92.397.000	Sumber Dana DAU
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah	100%	Rp 294.597.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah	100%	Rp 294.597.900	Sumber Dana DAU
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 1.594.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 1.594.000	Sumber Dana DAU
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	Rp 7.173.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	Rp 7.173.000	Sumber Dana DAU
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 46.252.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 46.252.300	Sumber Dana DAU
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	Rp 18.780.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	Rp 18.780.600	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	Rp 33.923.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	Rp 33.923.000	Sumber Dana DAU
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 lap	Rp 11.725.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 lap	Rp 11.725.000	Sumber Dana DAU
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	Rp 175.150.000	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	Rp 175.150.000	Sumber Dana DAU
1.5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi</i>	100%	<b>Rp 537.548.000</b>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi</i>	100%	<b>Rp 537.548.000</b>	Sumber Dana DAU
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp 447.782.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp 447.782.000	Sumber Dana DAU
1.5.2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	Rp 37.910.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	Rp 37.910.000	Sumber Dana DAU
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	Rp 51.856.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	Rp 51.856.000	Sumber Dana DAU
1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</i>	100%	<b>Rp 105.039.900</b>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</i>	100%	<b>Rp 105.039.900</b>	Sumber Dana DAU
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 105.039.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 105.039.900	Sumber Dana DAU
1.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang baik</i>	100%	<b>Rp 298.972.200</b>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang baik</i>	100%	<b>Rp 298.972.200</b>	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	Rp 279.910.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	Rp 279.910.000	Sumber Dana DAU
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Rp 19.062.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Rp 19.062.200	Sumber Dana DAU
2.	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik</b>	Kabupaten Pasuruan	<b>Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 16.106.394.600</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik</b>	Kabupaten Pasuruan	<b>Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 16.106.394.600</b>	Sumber Dana DAU
2.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>1. Persentase realisasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 16.106.394.600</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>1. Persentase realisasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 16.106.394.600</i>	Sumber Dana DAU
			<i>2. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang</i>	<i>4 lemb</i>				<i>2. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang</i>	<i>4 lemb</i>		Sumber Dana DAU
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	9500 org	Rp 15.754.054.600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	9500 org	Rp 15.754.054.600	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	150 org	Rp 9.800.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	150 org	Rp 9.800.000	Sumber Dana DAU
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	Rp 178.620.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	Rp 178.620.000	Sumber Dana DAU
2.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	10 dokumen	Rp 163.920.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	10 dokumen	Rp 163.920.000	Sumber Dana DAU
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90%	Rp 8.753.791.800	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90%	Rp 8.753.791.800,00	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	100%	Rp 8.753.791.800	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	100%	Rp 8.753.791.800	Sumber Dana DAU
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17800 orang	Rp 7.510.302.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17800 orang	Rp 7.510.302.800	Sumber Dana DAU
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 orang	Rp 25.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 orang	Rp 25.000.000	Sumber Dana DAU
3.1.3	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabupaten Pasuruan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dokumen	Rp 108.765.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabupaten Pasuruan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dokumen	Rp 108.765.000	Sumber Dana DAU
3.1.4	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paskibraka	84 orang	Rp 1.109.724.000	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paskibraka	84 orang	Rp 1.109.724.000	Sumber Dana DAU
4.	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Kabupaten Pasuruan	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.513.239.600</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Kabupaten Pasuruan	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.513.239.600</b>	Sumber Dana DAU
4.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	100%	Rp 5.513.239.600	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Kabupaten Pasuruan	<i>Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	100%	Rp 5.513.239.600	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	16000 orang	Rp 5.494.079.600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	16000 orang	Rp 5.494.079.600	Sumber Dana DAU
4.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	150 orang	Rp 9.800.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	150 orang	Rp 9.800.000	Sumber Dana DAU
4.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	4 Laporan	Rp 9.360.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	4 Laporan	Rp 9.360.000	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	82%	Rp 78.668.940.160	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	82%	Rp 78.668.940.160,00	Sumber Dana DAU
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi  2. Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan  3. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	100%	Rp 3.675.250.600	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi  2. Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan  3. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	100%	Rp 3.675.250.600	Sumber Dana DAU
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	8800 org	Rp 78.659.140.160	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	8800 org	Rp 78.659.140.160	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1 2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	150 org	Rp 9.800.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	150 org	Rp 9.800.000	Sumber Dana DAU
6.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	Persentase ormas yang berperan aktif	100%	Rp 2.439.242.800	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	Persentase ormas yang berperan aktif	100%	Rp 2.439.242.800	Sumber Dana DAU
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas  2. Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	100%  18 lemb	Rp 1.079.242.800  Rp 1.360.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas  2. Jumlah ormas yang terfasilitasi	100%  12 lemb	Rp 1.079.242.800  Rp 1.360.000.000	Sumber Dana DAU  Sumber Dana DAU
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3700 org	Rp 2.424.192.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3700 org	Rp 2.424.192.800	Sumber Dana DAU



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	150 orang	Rp 9.800.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	150 orang	Rp 9.800.000	Sumber Dana DAU
6.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 lap	Rp 5.250.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 lap	Rp 5.250.000	Sumber Dana DAU
<b>JUMLAH</b>					<b>117.053.290.000</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>117.053.290.000</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada usulan dari beberapa Kecamatan dan tokoh masyarakat diantaranya untuk tujuan :

1. Meningkatkan Rasa Nasionalisme khususnya bagi Generasi Muda sebagai Penerus Bangsa ;
2. Meningkatkan partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilukada Tahun 2024.
3. Menurunkan Kasus Penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan anak muda ;
4. Meningkatkan Kewaspadaan dini dalam upaya deteksi dini dan Cegah Dini terhadap Konflik yang terjadi di masyarakat.
5. Meningkatkan Ketahanan ekonomi, social budaya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan berbagai potensi ekonomi disekitarnya.

Dari beberapa Usulan Masyarakat / Pemangku kepentingan ada kesuaian dengan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Ideologi negara dan wawasan kebangsaan.
2. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilikada.
3. Masih Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
4. Masih adanya Isu-isu konflik Sosial Politik ;
5. Masih banyaknya potensi ekonomi, social dan budaya yang belum dipahami masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi, social dan budaya.

Adapun Data usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>90%</b>	
	[ KEGIATAN ] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16500 orang	Usulan Pokir Dewan
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 orang	Usulan Masyarakat
<b>2</b>	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	
	[ KEGIATAN ] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15200 orang	Usulan Pokir Dewan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800 orang	Usulan Masyarakat
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kabupaten Pasuruan	<b>Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	
	[ KEGIATAN ] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat	100%	
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	4 lembaga	
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8500 orang	Usulan Pokir Dewan
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 orang	Usulan Masyarakat
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penerima Hibah pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 tahun	Usulan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif</b>	<b>22%</b>	
	[ KEGIATAN ] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	
			Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	12 lembaga	
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3200 orang	Usulan Pokir Dewan
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 orang	Usulan Masyarakat
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penerima Hibah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 tahun	Usulan Masyarakat
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik</b>	<b>82%</b>	
	[ KEGIATAN ] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	100%	
			Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	9 parpol	
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	2 lembaga	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7500 orang	Usulan Pokir Dewan
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	Usulan Masyarakat
	[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penerima Hibah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 tahun	Usulan Masyarakat

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PASURUAN**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas Pembangunan Nasional khususnya yang terkait dengan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum adalah “ Focus dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang pekerja keras, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbuka dengan talenta global untuk bermitra “.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan berdasarkan Pancasila, melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penguatan dan intervensi ideologi pancasila dan nilai - nilai kebangsaan;
- c. Peningkatan peran partai politik dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- d. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan.

Sedangkan strategi yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan wawasan kebangsaan;
2. Meningkatkan peran Partai Politik melalui pendidikan politik dan etika budaya politik.
3. Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat melalui manajemen organisasi;
4. Meningkatkan antisipasi dan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik;
5. Pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat yang mendorong kearah kehidupan yang menjunjung HAM.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Pengembangan sistem politik yang demokratis;
3. Peningkatan kualitas penanganan konflik;

**3.2 Tujuan dan Sasaran**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai satuan kerja yang

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2024-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah “ **Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah**”.

Sesuai dengan Tujuan Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah :

“ **Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas wilayah** ”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “ **Meningkatnya Iklim Investasi** ”, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

**1. Meningkatnya respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya ( IPOLEKSOSUBUD )**

Dengan indikator sasaran adalah :

- a. Persentase kejadian konflik IPOLEKSOSUBUD yang ditindaklanjuti; Penentuan Indikator ini didasarkan pada adanya kejadian yang berkembang di masyarakat yang mengakibatkan suatu tindakan yang mengarah pada terjadinya konflik di masyarakat (kasus) yang ditindaklanjuti.

Indikator ini membandingkan antara kejadian Konflik Ipoleksosbud (kasus) di masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi total kejadian Konflik pada tahun berjalan.



## **2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dengan Indikator sasaran “ Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP ) yang diperoleh perangkat daerah pada tahun berjalan“.

Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2024**

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
<b>TUJUAN</b>				
Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	N/A	15%	18%
<b>SASARAN</b>				
Meningkatnya Respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ipoleksosbud	Persentase Kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti	90,90%	92,00%	94%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,10	80,15	80,25

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, Pemangku Kepentingan, Pemerintah Daerah serta untuk melanjutkan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, maka dalam mewujudkan keharmonisan tata kehidupan sosial masyarakat yang multikultural diperlukan adanya sinergitas pemahaman dan tindakan antisipatif dan responsif dari Pemerintah dan masyarakat, bisa dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan Forum Diskusi yang bertujuan untuk memberikan arah kesepahaman guna mendeteksi dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. Program juga diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Rumusan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2024 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023. Hanya saja tidak semuanya dapat dimasukkan dalam Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang disebabkan oleh beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Menyesuaikan dengan Isu-isu strategis yang sedang berkembang ;
2. Kondisi dan Kebutuhan Tahun 2024 baik jenis kegiatan maupun perencanaan Pagu Anggaran;

Dalam rangka mencapai sasaran yang ingin di wujudkan pada tahun 2024, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib melakukan Pemetaan Program dan Kegiatan menurut Kodefikasi, Nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Pasuruan telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu ada 6 program dengan 12 kegiatan dan 36 sub. kegiatan sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**, dengan kegiatan dan Sub kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan subkegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
  - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
  - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
  - Pembentukan Paskibraka

**3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK,** dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

**4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN,** dengan kegiatan dan subkegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan subkegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA,** dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan subkegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

**6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**, dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan subkegiatan :
  - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
  - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
  - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini :

<b>Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>		<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>117.053.290.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>116.515.742.000,00</b>
	- Belanja Pegawai	:	Rp.	3.685.550.296,00
	- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.	23.559.030.144,00
	- Belanja Hibah	:	Rp.	89.271.161.560,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>537.548.000,00</b>

Rincian Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.571.681.040,-</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	47.968.000,-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	14.218.000,-
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	33.750.000,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.195.158.040,-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.685.550.296,-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	396.447.744,-
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	113.160.000,-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	92.397.000,-
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	92.397.000,-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	294.597.900,-
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	1.594.000,-
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	7.173.000,-
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	46.252.300,-
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	18.780.600,-
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	33.932.000,-
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	11.725.000,-
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	175.150.000,-
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	537.548.000,-
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	447.782.000,-
1.5.2	Pengadaan Mebel	Rp.	37.910.000,-
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	51.856.000,-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	105.039.900,-
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	105.039.900,-
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	298.972.200,-
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	279.910.000,-
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	19.062.200,-

<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.106.394.600,-</b>
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	16.106.394.600,-
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	15.754.054.600,-
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	9.800.000,-
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	178.620.000,-
2.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	163.920.000,-
<b>3.</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.753.791.800,-</b>
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	8.753.791.800,-
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	7.510.302.800,-
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	25.000.000,-
3.1.3	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp.	108.765.000
3.1.4	Pembentukan Paskibraka	Rp.	1.109.724.000



<b>4.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.513.239.600,-</b>
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp.	5.513.239.600,-
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	5.494.079.600,-
4.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	9.800.000,-
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	9.360.000,-
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Rp.</b>	<b>78.668.940.160,-</b>
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	78.668.940.160,-
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	78.659.140.160,-
5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	9.800.000,-
<b>6.</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.439.242.800,-</b>

6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	2.439.242.800,-
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.	2.424.192.800,-
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.	9.800.000,-
6.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.	5.250.000,-

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk mendukung terciptanya keamanan, kenyamanan dan kondusifitas wilayah Kabupaten Pasuruan yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta aspirasi masyarakat yang merupakan hasil dari Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

Penyusunan Rencana Kerja juga harus didasarkan pada Program Prioritas Perangkat Daerah dimana Pada Tahun 2024 kita dihadapkan pada pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024. Hal ini menjadi momentum bagi kita untuk mengharmonisasikan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Partai Politik demi untuk sukses dan amannya Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam rangka melaksanakan Program Prioritas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan melalui Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah melakukan Sosialisasi dibidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu maupun Pemilukada di tahun 2024. Disamping itu juga melakukan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan (KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasuruan) dengan memberikan Bantuan Hibah Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pilkada 40% di Tahun 2023 dan 60% di Tahun 2024 serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Jumlah kursi yang ada di Parlemen. Dari uraian diatas, ketika harmonisasi Pemilu, Pemilukada dan Partai Politik terwujud, harapannya Pesta demokrasi berjalan aman, jujur dan berwibawa.

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 membutuhkan dana (anggaran) sebesar **Rp. 117.053.290.000,00** yang terdiri dari 6 Program dengan 12 Kegiatan dan 31 Sub. Kegiatan dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4 ( T-C.33 ).

**Tabel 4 ( T-C.33 )**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**KABUPATEN PASURUAN**

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Unsur Pemerintahan Umum									
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang sesuai regulasi		100%	Rp 5.571.681.040			100%	Rp 5.184.109.788
8 01 01 2 01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator program/ kegiatan/ sub. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi		100%	Rp 47.968.000			100%	Rp 51.301.600
8 01 01 2 01 01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 dok	Rp 14.218.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 14.218.000 - Belanja Modal :	DAU		1 dok	Rp 17.301.600 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 17.301.600 - Belanja Modal :
8 01 01 2 01 07	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14 Laporan	Rp 33.750.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 33.750.000 - Belanja Modal :	DAU		14 Laporan	Rp 34.000.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 34.000.000 - Belanja Modal :
8 01 01 2 02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	Rp 4.195.158.040			100%	Rp 4.126.425.700
8 01 01 2 02 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	364 org/bln	Rp 3.685.550.296 - Belanja Pegawai : Rp 3.685.550.296 - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal :	DAU		364 org/bln	Rp 3.629.736.000 - Belanja Pegawai : Rp 3.629.736.000 - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal :
8 01 01 2 02 02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Dokumen	Rp 396.447.744 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 396.447.744 - Belanja Modal :	DAU		12 Dokumen	Rp 398.240.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 398.240.000 - Belanja Modal :
8 01 01 2 02 03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Dokumen	Rp 113.160.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 113.160.000 - Belanja Modal :	DAU		12 Dokumen	Rp 98.449.700 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 98.449.700 - Belanja Modal :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2 05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%	Rp 92.397.000			100%	Rp 92.400.000
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44 orang	Rp 92.397.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 82.397.000 - Belanja Modal :	DAU		44 orang	Rp 92.400.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 92.400.000 - Belanja Modal :
8 01 01 2 06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah		100%	Rp 294.597.900			100%	Rp 379.892.488
8 01 01 2 06 02	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket	Rp 1.594.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.594.000 - Belanja Modal :	DAU		4 paket	Rp 17.019.700 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 17.019.700 - Belanja Modal :
8 01 01 2 06 03	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket	Rp 7.173.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.173.000 - Belanja Hibah :	DAU		4 paket	Rp 25.951.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 25.951.000 - Belanja Hibah :
8 01 01 2 06 04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket	Rp 46.252.300 - Belanja Pegawai : Rp - Belanja Barang dan Jasa : Rp 46.252.300 - Belanja Modal :	DAU		4 paket	Rp 96.162.588 - Belanja Pegawai : Rp - Belanja Barang dan Jasa : Rp 96.162.588 - Belanja Modal :
8 01 01 2 06 05	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket	Rp 18.780.600 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 18.780.600 - Belanja Modal :	DAU		4 paket	Rp 29.970.300 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 29.970.300 - Belanja Modal :
8 01 01 2 06 05	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 dok	Rp 33.923.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 33.923.000 - Belanja Modal :	DAU		12 dok	Rp 6.783.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 6.783.000 - Belanja Modal :
8 01 01 2 06 06	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Laporan	Rp 11.725.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 11.725.000 - Belanja Modal :	DAU		9 Laporan	Rp 18.631.500 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 18.631.500 - Belanja Modal :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2 06 09	7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan, Prov. Jatim dan luar Prov. Jatim	12 Laporan	Rp 175.150.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 175.150.000 - Belanja Modal :	DAU		12 Laporan Rp 185.374.400 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 185.374.400 - Belanja Modal :	
8 01 01 2 07	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	Rp 537.548.000			100% Rp 148.756.800	
8 01 01 2 07 01	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 unit	Rp 447.782.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal : Rp 447.782.000	DAU		1 unit Rp - - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal : Rp -	
8 01 01 2 07 02	2. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 paket	Rp 37.910.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal : Rp 37.910.000	DAU		1 paket Rp 21.811.600 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal : Rp 21.811.600	
8 01 01 2 07 03	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6 unit	Rp 51.856.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal : Rp 51.856.000	DAU		14 unit Rp 126.945.200 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : - Belanja Modal : Rp 126.945.200	
8 01 01 2 08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100% <sup>**</sup>	Rp 105.039.900			100% <sup>**</sup> Rp 106.080.400	
8 01 01 2 08 02	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 laporan	Rp 105.039.900 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 105.039.900 - Belanja Modal :	DAU		12 laporan Rp 106.080.400 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 106.080.400 - Belanja Modal :	
8 01 01 2 09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang baik		100%	Rp 298.972.200			100% Rp 279.252.800	
8 01 01 2 09 01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17 unit	Rp 279.910.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 279.910.000 - Belanja Modal :	DAU		17 unit Rp 257.761.100 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 257.761.100 - Belanja Modal :	
8 01 01 2 09 03	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15 unit	Rp 19.062.200 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 19.062.200 - Belanja Modal :	DAU		24 unit Rp 21.491.700 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 21.491.700 - Belanja Modal :	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti		100%	Rp 16.106.394.800			100%	Rp 5.861.665.700
8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase realisasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat - Jumlah instansi vertikal yang terfasilitasi		100% 4 lembaga	Rp 16.106.394.800			100% 4 lembaga	Rp 5.861.665.700
8 01 06 2 01 03	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	8.700 org	Rp 15.754.054.600 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 2.836.582.600 - Belanja Hibah : Rp 12.917.472.000	DAU		8.750 org - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 837.700.200 - Belanja Hibah : Rp 4.500.000.000	Rp 5.337.700.200
8 01 06 2 01 04	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	150 org	Rp 9.800.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.800.000 - Belanja Hibah : Rp -	DAU		250 org - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 27.500.000 - Belanja Hibah : Rp -	Rp 27.500.000
8 01 06 2 01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	Rp 178.620.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 178.620.000 - Belanja Hibah : Rp -	DAU		12 Laporan - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 168.865.500 - Belanja Hibah : Rp -	Rp 168.865.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 06 2 01 06	4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	10 dokumen	Rp 163.920.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 163.920.000 - Belanja Hibah : Rp -	DAU		12 dokumen - Belanja Pegawai : Rp 327.600.000 - Belanja Barang dan Jasa : Rp 327.600.000 - Belanja Hibah : Rp -	
8 01 02	Program Pengujian Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		90%	Rp 8.753.791.800			91%	Rp 2.472.873.708
8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	Rp 8.753.791.800			100%	Rp 2.472.873.708
8 01 02 2 01 03	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kabupaten Pasuruan	17.800 org	Rp 7.510.302.800 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.510.302.800 - Belanja Hibah :	DAU		2.300 org - Belanja Pegawai : Rp 1.244.873.708 - Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.244.873.708 - Belanja Hibah :	
8 01 02 2 01 04	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	200 org	Rp 25.000.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 25.000.000 - Belanja Hibah :	DAU		250 org - Belanja Pegawai : Rp 28.000.000 - Belanja Barang dan Jasa : Rp 28.000.000 - Belanja Hibah :	
8 01 02 2 01 07	3. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka Kebangsaan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	Rp 108.765.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 108.765.000 - Belanja Hibah :	DAU		1 dokumen - Belanja Pegawai : Rp 150.000.000 - Belanja Barang dan Jasa : Rp 150.000.000 - Belanja Hibah :	
8 01 02 2 01 08	4. Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kabupaten Pasuruan	84 org	Rp 1.109.724.000 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.109.724.000 - Belanja Hibah :	DAU		84 org - Belanja Pegawai : Rp 1.050.000.000 - Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.050.000.000 - Belanja Hibah :	
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	Rp 5.513.239.600			100%	Rp 520.200.000
8 01 05 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	Rp 5.513.239.600			100%	Rp 520.200.000
8 01 05 2 01 03	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Kabupaten Pasuruan	16.000 org	Rp 5.494.079.600 - Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 5.494.079.600 - Belanja Hibah :	DAU		950 org - Belanja Pegawai : Rp 477.700.000 - Belanja Barang dan Jasa : Rp 477.700.000 - Belanja Hibah :	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Perincian	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 05 2 01 04	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	150 org	Rp 9.800.000	DAU		200 org	Rp 22.500.000
					- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.800.000 - Belanja Hibah :			- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 22.500.000 - Belanja Hibah :	
8 01 05 2 01 05	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	4 Laporan	Rp 9.360.000	DAU		4 Laporan	Rp 20.000.000
					- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.360.000 - Belanja Hibah :			- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 20.000.000 - Belanja Hibah :	
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik		82%	Rp 78.668.940.160			84%	Rp 9.093.070.000
8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi		100%	Rp 78.668.940.160			100%	Rp 9.093.070.000
		- Jumlah partai politik yang terfasilitasi.		9 parpol				9 parpol	
		- Jumlah instansi vertikal yang terfasilitasi		2 lembaga				2 lembaga	
8 01 03 2 01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Daerah, Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	-Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	Kabupaten Pasuruan	8.800 org	Rp 78.659.140.160	DAU		1.300 org	Rp 9.078.070.000
					- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.665.450.600 - Belanja Hibah : Rp 66.373.619.560 - Bantuan Keuangan Parpol : Rp 8.620.070.000			- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 458.000.000 - Belanja Hibah : Rp - Bantuan Keuangan Parpol : Rp 8.620.070.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 03 2 01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Daerah, Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	-Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemiluh/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	Kabupaten Pasuruan	150 org	Rp 9.800.000	DAU		200 org	Rp 15.000.000
					- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.800.000 - Belanja Hibah : Rp -				- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 15.000.000 - Belanja Hibah : Rp -
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase ormas yang berperan aktif		22%	Rp 2.439.242.800			25%	Rp 4.194.717.778
8 01 04 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Realisasi Kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas		100%	Rp 2.439.242.800			100%	Rp 4.194.717.778
		- Jumlah Ormas yang terfasilitasi		12 lemb				14 lemb	
8 01 04 2 01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	3.700 org	Rp 2.424.192.800	DAU		1.000 org	Rp 4.171.842.778
					- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.064.192.800 - Belanja Hibah : Rp 1.360.000.000				- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 271.842.778 - Belanja Hibah : Rp 3.900.000.000
8 01 04 2 01 04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	150 orang	Rp 9.800.000	DAU		200 orang	Rp 15.000.000
					- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.800.000 - Belanja Hibah : :				- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 15.000.000 - Belanja Hibah : :
8 01 04 2 01 05	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	2 laporan	Rp 5.250.000	DAU		2 laporan	Rp 7.875.000
					- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 5.250.000 - Belanja Hibah : :				- Belanja Pegawai : - Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.875.000 - Belanja Hibah : :
					117.063.290.000				27.326.636.974

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Bahwa Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memudahkan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian serta sebagai bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub. Kegiatan sesuai yang telah direncanakan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang tentunya mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Untuk meningkatkan keamanan dan kondusifitas wilayah serta dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, yaitu :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan penting dan Pokok guna mendukung pelaksanaan Tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, seperti :
  - Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi masyarakat serta Fasilitasi lembaga Pemerintah yang menangani Pemilihan Umum maupun Pemilukada dalam rangka meningkatkan Partisipasi Pemilu yang jujur dan berwibawa.
  - Meningkatkan kegiatan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat serta respons cepat terhadap berkembangnya paham radikalisme dikalangan anak muda;
  - kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - Meningkatkan pemberdayaan Organisasi masyarakat yang dapat menghasilkan kaderisasi handal yang dapat mendukung pembangunan daerah.
  - Meningkatkan kerjasama dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik didalam internal perangkat daerah maupun antar Instansi dalam rangka sinkronisasi dan meningkatkan hubungan Kerjasama yang sinergitas.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**